

LAPORAN KINERJA

KECAMATAN PARIGI

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2023



KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Parigi merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Parigi Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Parigi Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Parigi. Kinerja Kecamatan Parigi diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Parigi Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Parigi Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Parigi pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Parigi, 22 Januari 2024

Camat Parigi



NAMU SUKARNA, S.IP

NIP. 19691213 198910 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	3
D. Landasan Hukum	4
E. Sistematika	5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	6
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi	12
2. Realisasi Anggaran	18
3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20

BAB IV PENUTUP 21

LAMPIRAN

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH

MATRIKS RENSTRA

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Parigi selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

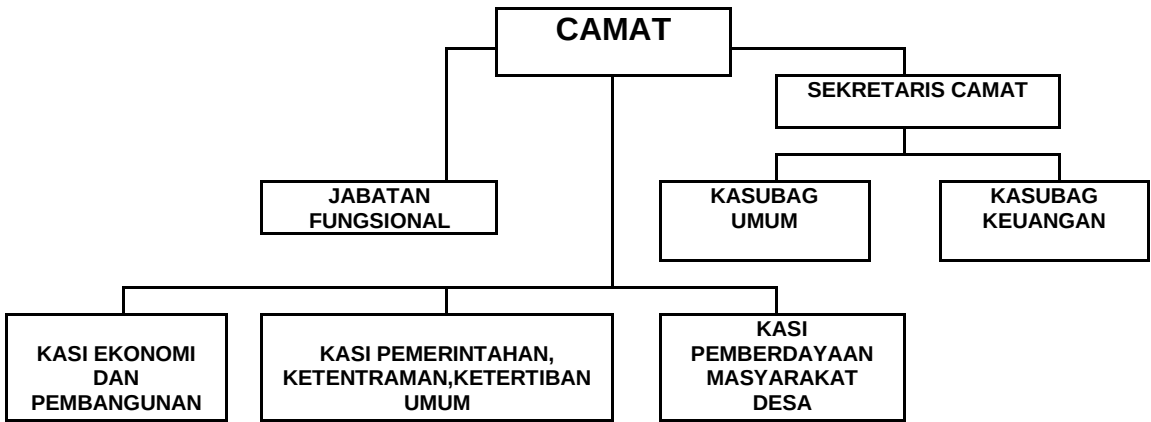
Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut : Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Parigi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- h. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan daerah, yang meliputi aspek: perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi penetapan penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural, Sekertaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

STRUKTUR KECAMATAN PARIGI
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Parigi periode 2021-2026 sebagai berikut :

- a) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- c) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- d) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- e) Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan kecamatan.
- f) Kurang maksimalnya pembinaan/koordinasi aparatur Kecamatan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Perumusan Isu strategis pada Tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Parigi periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi

Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2021 sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara menyeluruh.
- b) Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c) Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
- d) Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas.

D. Landasan Hukum

Acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

D. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Rencana Strategis Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

**“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA
YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA”**

2. Visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
- 2) Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan.
- 3) Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.
- 4) Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal.
- 5) Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.
- 6) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Parigi mengacu pada Misi ke 5, yaitu:

Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 sebanyak tujuan dan sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

Tabel 1 :
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Parigi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningka tkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerinta han yang baik (<i>good governanc e</i>)	Meningkat kan kapasitas tata kelola pemerinta han yang mampu memberik an pelayanan publik yang prima	Nilai SAKIP Kecamatan	B (65-66)	B (67-68)	B (68-70)	BB (70-75)	A (75-80)	A (80-85)
2.	Meningka tkan kualitas pelayana n publik yang cepat dan responsif		Indeks Pelayanan Publik	N/A	80%	85%	90%	95%	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Parigi periode 2021-2026

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parigi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan Parigi	Indeks	-	Insfektorat
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	<u>Jumlah Nilai per Unsur penilaian</u> Jumlah kuesioner yang terisi	Kecamatan Parigi

4. Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Parigi Tahun 2023:

Tabel 3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningka tkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerinta han yang baik (<i>good governanc e</i>)	Meningkat kan kapasitas tata kelola pemerinta han yang mampu memberik an pelayanan publik yang prima	Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	B (68-70)
2.	Meningka tkan kualitas pelayana n publik yang cepat dan responsif		Indeks Pelayanan Publik	Nilai	85%

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal xx bulan xx Tahun 2023ditetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	4	5	6
1.	Meningka tkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerinta han yang baik (<i>good governanc e</i>)	Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	B (68-70)
2.	Meningka tkan kualitas pelayana n publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	85%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Parigi Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Parigi :

Tabel 5
Program dan Kegiatan Kecamatan Parigi Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	1.431.038.088
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	13.490.389

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 25 bulan 08 Tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran), dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 4
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	3	5
1.	Meningka tkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerinta han yang baik (<i>good governanc e</i>)	Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	B (68-70)
2.	Meningka tkan kualitas pelayana n publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	85%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Parigi Tahun 2023

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 5
Program dan Kegiatan Kecamatan Parigi Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	1.532.246.568
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	13.490.389

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 (setelah perubahan)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Parigi Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parigi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

a. Catatan Perbaikan tahun sebelumnya

Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya diantaranya :

- a) Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya sudah ditindaklanjuti dan Laporan kinerja perlu disusun untuk perbaikan perencanaan baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.
- b) Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik instansi dapat menindaklanjuti catatan dari evaluator eksternal dan evaluator internal (inspektorat)
- c) Sudah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dan di implementasikan untuk meningkatkan kinerja yang baik dengan capaian yang baik pula.
- d) Dilakukan peningkatan kinerja dengan bukti yang cukup bahwa informasi dalam LKJIP digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Parigi Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningka tkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerinta han yang baik (<i>good governanc e</i>)	Nilai SAKIP Kecamatan Parigi	B	B	100	Baik	Insfektorat
2	Meningka tkan kualitas pelayana n publik yang cepat dan responsif	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	82,3	110	Baik	SKM Kecamatan Parigi

Uraian penjelasan tabel :

Untuk tujuan pertama sudah memenuhi target kinerja dan untuk tujuan kedua melebihi target yang sudah ditentukan

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Nilai SAKIP Kecamatan Parigi	B	B	100	B	C	90
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	110	80	82,3	110

Uraian penjelasan tabel :

Dari tahun 2021 sampai Tahun 2023 sudah ada peningkatan capaian target indikator kinerja kecamatan Parigi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Nilai SAKIP Kecamatan Parigi	C	A	N/A
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,3	100	82,3

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis kecamatan Parigi terus ditingkatkan dengan peningkatan kinerja yang baik

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningka tkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerinta han yang baik (<i>good governanc e</i>)	Nilai SAKIP Kecamatan Parigi	C	-	-
2	Meningka tkan kualitas pelayana n publik yang cepat dan responsif	Indek Kepuasan Masyaraka t (IKM)	82,3	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisas i	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningka tkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerinta han yang baik (<i>good governanc e</i>)	Nilai SAKIP Kecamatan Parigi	B	C	90	Efisiensi anggaran	Memaksimal kan kinerja
2	Meningka tkan kualitas pelayana n publik yang cepat dan responsif	Indek Kepuasan Masyarak at (IKM)	80	81	110	Kekurangan SDM	Memaksimal kan SDM yang ada

Uraian penjelasan tabel :

Keterbatasan anggaran guna memaksimalkan kinerja yang harus sesuai target

Kurangnya SDM profesional dan perlunya Peningkatan kapasitas SDM

Kurangnya tenaga PNS yang professional dibidang Administrasi publik diharapkan ada Penambahan jumlah PNS dan dilaksanakannya diklat dan bimbingan teknis mengenai pelayanan administrasi terpadu

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningka tkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerinta han yang baik (<i>good governanc e</i>)	Nilai SAKIP Kecamatan Parigi	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Persentas e sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentas e laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentas e peningkat an kompeten si aparatur 4. Persentas e perencana an dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	Menunjang
2	Meningka tkan kualitas pelayana n publik yang cepat dan responsif	Indek Kepuasa n Masyara kat (IKM)	110	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentas e Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	100%	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang ada di kecamatan Parigi merupakan bentuk Kerjasama yang bai kantar pegawai dengan arahan dari pimpinan

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.532.246.568	1.266.788.427	83
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.400.000	22.700.000	93

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.254.677.314	1.027.319.645	82
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.400.000	22.700.000	93
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.100.000	24.400.000	93
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.600.000	14.600.000	94
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.855.000	3.852.900	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.563.772	16.563.750	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.875.000	2.449.400	85
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.200.000	1.800.000	82
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.490.000	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.199.160	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000	14.830.485	67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.586.000	72.305.000	93
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.580.322	30.547.247	97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	7.500.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.720.000	4.720.000	100
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.490.389	13.490.000	100
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.490.389	13.490.000	100

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	B	B	100	1.532.246.568	1.266.788.427	83	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	80	81	110	13.490.389	13.490.000	100	

Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran yang sudah dilaksanakan di kecamatan Parigi memiliki capaian yang baik dan bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pelayanan public yang maksimal

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka penca`paian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	100	100	100	1.532.246.568	1.266.788.427	83	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	24.400.000	22.700.000	93	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	1.254.677.314	1.027.319.645	82	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	100	24.400.000	22.700.000	93	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	100	100	26.100.000	24.400.000	93	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100	100	100	15.600.000	14.600.000	94	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100	100	3.855.000	3.852.900	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100	16.563.772	16.563.750	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	100	100	2.875.000	2.449.400	85	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	0	0	2.200.000	1.800.000	82	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	0	0	3.490.000	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	100	14.199.160	-	-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100	500.000	500.000	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	100	100	22.000.000	14.830.485	67	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100	100	77.586.000	72.305.000	93	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	100	100	31.580.322	30.547.247	97	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	100	7.500.000	7.500.000	100	
	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	100	100	4.720.000	4.720.000	100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN	100	100	100	13.490.389	13.490.000	100	

	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100	100	100	13.490.389	13.490.000	100	

Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan di kecamatan Parigi sudah sesuai dan efisiensi sesuai dengan target dan realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2023 Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran menetapkan sebanyak 2 tujuan, 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 83% (kategori Baik)
- Tujuan 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Baik)
- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.545.736.957,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.280.278.427,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 serapan anggaran sebesar 97% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 25%.

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Kecamatan Parigi, antara lain:

- a) Terjadinya refocusing anggaran sehingga banyak kegiatan yang dialihkan untuk penanganan pandemi covid 19
- b) Keterbatasan pelayanan pada saat pandemi covid 19, yang biasanya dilakukan tatap muka sekarang dilakukan melalui online
- c) Masih minimnya koordinasi dari masing-masing seksi dalam mengusulkan dan pelaksanaan program dan kegiatan;

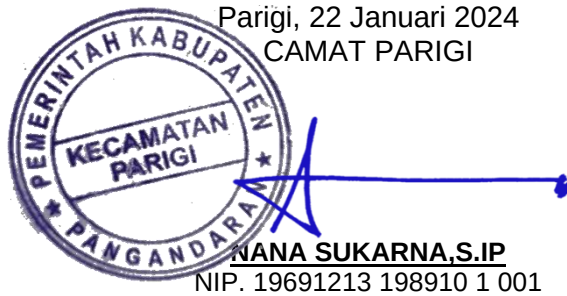
- d) Masih ditemukannya kendala/hambatan dalam merealisasikan program dan kegiatan;
- e) Keterbatasan aparatur dalam memiliki kemampuan IT;
- f) Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memahami SAKIP.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan Kecamatan Parigi, antara lain :

- a) Memaksimalkan pelayanan melalui online atau tapa muka dan cepat menindaklanjuti keluhan yang terjadi
- b) Mengusulkan dan melaksanakan kegiatan yang tertunda tahun sebelumnya
- c) Melakukan koordinasi semua seksi/subbag mulai dari perencanaan, pengusulan dan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan;
- d) Mencari solusi dalam menyelesaikan kendala/hambatan dalam merealisasikan kegiatan;
- e) Mengikutsertakan pengembangan dan peningkatan pengetahuan aparatur untuk mengikuti Diklat/Pelatihan IT;
- f) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti Bimtek/Pelatihan terkaitSAKIP;

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Parigi.

Parigi, 22 Januari 2024
CAMAT PARIGI



NANA SUKARNA,S.IP
NIP. 19691213 198910 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN PARIGI
Jln. Raya Cintaratu, Parigi 46393
Email : kecparigi01@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 188/ 04 / Kpts-Kec./ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023

CAMAT PARIGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perumusan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dipandang perlu untuk membentuk Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Parigi Tahun 2023;
- b. bahwa guna kepentingan hal dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Parigi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana berikut :

1. Menyiapkan materi sebagai bahan perumusan LKIP Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
2. Memfasilitasi perumusan LKIP Kecamatan Parigi dengan berlandaskan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas perumusan LKIP kepada Camat Parigi Kabupaten Pangandaran.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

CAMAT PARIGI



WANA SUKARNA, S.IP
NIP. 19691213 198910 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran
5. Tim LKIP Kecamatan Parigi

Lamipran : Keputusan Camat Parigi
Nomor : 188/ 04/ Kpts-Kec./ 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023

NO.	KASI	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Camat	Ketua	Tim LKIP
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	Kecamatan Parigi
3.	Kasi Pemtrantibum	Anggota	
4.	Kasi PMD	Anggota	
5.	Kasi Ekbang	Anggota	
6.	Kasubag Umum	Anggota	
7.	Kasubag Keuangan	Anggota	
8.	Operator Perencana	Anggota	
9.	Operator Keuangan	Anggota	
10.	Operator Barang	Anggota	

CAMAT PARIGI



MANA SUKARNA,S.IP
NIP. 19691213 198910 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN PARIGI

Jalan Raya Cintaratu Parigi 46393

Email : Kecparigi01@gmailcom

KEPUTUSAN CAMAT PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/ 12 /Kpts.–Kec/ 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 – 2026

CAMAT PARIGI KABUPATEN PANGAND ARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu diatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Parigi Nomor: 050/ 08/Kpts.–Kec/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
- c. bahwa berkenaan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 maka perlu untuk merubah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 disesuaikan dengan Perubahan RPJMD dimaksud;
- d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Camat Parigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 – 2026
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 20 Agustus 2021

CAMAT PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. SAPRUDIN, M.Si
NIP. 13650629 199301 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PARIGI**

- 1. Nama Organisasi : Kecamatan Parigi
- 2. Visi Kabupaten : Mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Tujuan Wisata Berkelas Dunia
- 3. Misi 1 Kabupaten : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani

Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan Parigi	Indeks	-	Inspektorat
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	$\frac{\text{Jumlah Nilai per Unsur penilaian}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$	Kecamatan Parigi

CAMAT PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. ~~SA~~ APRUDIN, M.Si
NIP. 19610629 199301 1 001

